

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Perkembangan pembangunan keuangan suatu bangsa merupakan gambaran bagaimana keadaan perkembangan moneter spasialnya yang terkecil, atau paling tidak, perkembangan moneter negaranya. Dalam kemajuan bidang moneter, yayasan moneter merupakan badan yang mempunyai pengaruh penting di dalamnya. Organisasi moneter adalah yayasan yang menawarkan jenis bantuan moneter kepada klien mereka, yang sebagian besar dikelola oleh pedoman moneter pemerintah. Jenis umum dari pembentukan moneter ini mencakup bank. Afiliasi pengembangan, asosiasi kredit, pialang saham, sumber daya eksekutif, investasi, koperasi, perlindungan, cadangan anuitas dan organisasi komparatif lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah unsur-unsur yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang moneter, menarik uang tunai dari masyarakat umum dan menyalurkan uang tunai ke daerah setempat. Lembaga keuangan saat ini dikenal sebagai yayasan perbankan sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Meninjau lebih jauh mengenai pertumbuhan ekonomi pedesaan, tidak lepas dengan adanya peran lembaga-lembaga keuangan yang memfasilitasi masyarakat desa dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya.

Lembaga keuangan / organisasi perbankan saat ini secara lokal menggabungkan bank bisnis, bank nasional, yayasan keuangan pengembangan, organisasi mediator untuk masalah dan penawaran perlindungan, agen asuransi, toko barang bekas, koperasi kredit, dan yayasan keuangan lainnya. Sementara itu, untuk jaringan negara di Bali secara eksplisit, fondasi moneter telah dibentuk di tengah jaringan kota konvensional yang menyatukan individu-individunya dengan pengaturan kerjasama bersama. Yayasan ini dikenal dengan Lembaga Perkreditan Desa. Pemerintah Provinsi Bali mengkomodir SK Gubernur Nomor 972 Tahun 1984 tanggal 1 November 1984 tentang Pendirian Perkreditan Kota.

LPD adalah lembaga keuangan yang memiliki tempat dengan kota Pakraman, dan memiliki tugas keuangan. Desa Pakraman percaya dalam menangani aset moneter properti Desa Pakraman, sebagai dana cadangan dan uang muka, untuk mendukung kehidupan. Dari individu-individu dari kelompok masyarakat Desa Pakraman, secara sendiri-sendiri dan bersama-sama, untuk membina unsur sosial, sosial dan tegas kelompok masyarakat Desa Pakraman, inilah yang dikenal dengan Lembaga Perkreditan Desa/LPD. (Mantra, 2005). Terutama pada jumlah LPD di Bali yang terdapat 1.436 LPD dengan total aset sebesar Rp. 23 triliun sebagai lembaga keuangan mikro yang telah berkembang di Bali,. Akan tetapi LPD di Bali ditemukan kondisi LPD yang tidak sehat, kurang sehat, macet (<https://balitribune.co.id/>, 2017). Salah satu upaya yang dilakukan LPLPD untuk LPD yang mengalami kondisi macet ini yaitu memberikan dana perlingkungandimana LPD Kabupaten Buleleng yang paling besar mendapatkan dan perlindungan sebesar Rp.630.000.000 hanya untuk 13 LPD (Data LP-LPD, 2017 dalam Sadiartha 2020), akan tetapi dilihat dari tahun 2018

LPD mengalami penurunan kesehatan sebanyak 42 LPD, hingga saat ini sebanyak 54 LPD yang mengalami penurunan kesehatan (LPLPD Kabupaten Buleleng). Kemajuan LPD bergantung pada sifat laporan keuangannya karena laporan keuangan yang baik akan berdampak pada kemajuan lembaga keuangan itu sendiri.

Sebagai lembaga keuangan, LPD berkomitmen untuk memberikan laporan fiskal sebagai kewajiban untuk melanjutkan tugas keuangan dan sebagai alasan navigasi. Kebutuhan konsistensi pengungkapan moneter yang tepat diarahkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa otoritas RDA berkomitmen untuk memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan, perputaran uang dan pelaksanaan LPD kepada Bendesa dan LPLPD. Laporan anggaran merupakan suatu item yang disampaikan oleh suatu bidang atau disiplin pembukuan (Roviyantie, 2011 dalam Karuniawan, 2017). Rangkuman fiskal akan bermanfaat bagi asosiasi jika data yang dimasukkan dalam laporan anggaran masuk akal, penting, dapat diandalkan, terbebas dari kesalahpahaman, dan menyajikan setiap realitas dengan mantap dan pasti. Namun, ada juga laporan keuangan yang tidak memberikan semua data. Data yang berlebihan akan berbahaya karena memberikan detail yang tidak penting akan mengaburkan data yang sangat penting dan sulit untuk dipahami. Jelas, setiap lembaga keuangan membutuhkan laporan moneter yang Pemodal moneter menerbitkannya sebagai laporan keuangan yang bagus karena dapat mempengaruhi kemajuan lembaga keuangan itu sendiri.

Namun, sebenarnya masih banyak LPD yang meremehkan siklus pengungkapan keuangan sehingga tidak sedikit LPD yang sering mengalami

masalah dalam waktu yang dihabiskan untuk merencanakan perincian keuangan, seperti yang terjadi di LPD Kabupaten Buleleng. Dari 169 LPD yang ada di Kabupaten Buleleng masih ada LPD yang telat guna memberikan laporan keuangannya sejak waktu penentuan, seperti LPD tunjung yang telat melaporkan laporan keuangannya (LPLPD Kabupaten Buleleng). Akomodasi laporan yang tidak nyaman akan mempengaruhi terhambatnya perbaikan keuangan di LPD. Menurut pimpinan LPLPD Kabupaten Buleleng sesuatu yang memberi pengaruh terlambatnya melaporkan keuangan karena minimnya pengetahuan pengurus dalam pembuatan laporan keuangan yang berstandar hal ini karena beberapa pengurus di masing- masing LPD tidak memiliki pendidikan terakhir di bidang akuntansi, beberapa LPD belum menerapkan teknologi informasi dalam menunjang aktivitasnya termasuk pembuatan laporan keuangan, selain itu lemahnya sistem pengendalian internal. Dilansir dari (<https://m.rri.co.id/singaraja/ekonomi/>) Hal ini juga disampaikan oleh pengamat ekonomi Buleleng Bapak Parma menilai pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual dan lemahnya pengawasan, hal ini menyebabkan pengelolaan keuangan tidak dilakukan dengan baik sehingga LPD sepanjang tahun tercatat bermasalah. Salah satu permasalahan LPD yaitu tidak tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangan.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, bahwa dari sekian banyak Lembaga Perkreditan Desa yang ada di Kabupaten Buleleng kondisi dan kemajuan LPDnya bervariasi. Berikut ini hasil pengamatan dan pengambilan data awal peneliti ke beberapa LPD yang menggambarkan secara umum bagaimana laporan keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing LPD dan kondisi LPD tersebut.

Tabel 1.1 Data Awal Kondisi LPD di Kabupaten Buleleng

No	Nama LPD	Kualitas Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Data Kesehatan
1.	LPD Kayuputih (Kec.Banjar)	Tepat waktu, andal, dapat dipahami, lengkap, terkomputerisasi	Kepala Pengurus	Sehat
2.	LPD Banyuatis (Kec.Banjar)	Tepat waktu, andal, dapat dipahami, lengkap, terkomputerisasi	Bendahara	Sehat
3	LPD M.Mengenu (Kec.Busungbiu)	Tepat waktu, kurang baik, dapat dipahami, lengkap, manual	Sekretaris	Sehat
4	LPD Lokapaksa (Kec.Seririt)	Tepat waktu, dapat dipahami, lengkap, manual	Sekretaris	Cukup Sehat
5.	LPD Tinggarsari (Kec. Busungbiu)	Tepat waktu, kurang baik, lengkap, manual	Kepala Pengurus	Kurang Sehat
6.	LPD Banyupoh (Kec.Gerokgak)	Tepat waktu, kurang baik, lengkap, manual	Bendahara	Tidak Sehat
7.	LPD Tunjung (Kec.Kubutambahan)	Tidak tepat waktu	Sekretaris	Tidak Lapori

Sumber: website resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Data Awal Peneliti (2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 ada LPD yang maju dengan cepat namun bertentangan dengan norma ada LPD yang belum terbentuk/berkembang. Kondisi ini perlu diwaspadai dan digali dengan tujuan agar dipahami mempengaruhi kemajuan suatu organisasi organisasi LPD. Kemajuan LPD bergantung pada sifat data ringkasan fiskalnya.

Berbagai perspektif dapat mempengaruhi bagaimana laporan keuangan yang berkualitas di LPD dapat disampaikan. Sudut pandang utama yang mengkhawatirkan para ilmuwan adalah kemampuan SDM. Kapabilitas adalah

kapasitas yang ada dalam diri individu untuk menunjukkan dan menerapkan kemampuannya secara nyata. SDM yang tidak memiliki skill tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, benar, dan secara finansial dengan tujuan agar pekerjaan yang disampaikan tidak tepat waktu dan ada latihan yang sia-sia. Dengan kemampuan SDM, peluang ideal untuk membuat laporan keuangan akan terselamatkan. Hal ini dikarenakan SDM tersebut sampai saat ini memiliki informasi dan pemahaman tentang apa yang harus dilaksanakan agar laporan anggaran yang diselesaikan & disusun sehingga dapat diperkenalkan tepat waktu (Karuniawan, 2017). Tingkat kemampuan aset yang disinggung untuk situasi ini adalah sejauh mana kemampuan pekerja LPD, khususnya sekretaris keuangan dan pemodal, berdampak pada pembuatan laporan nilai moneter. Sifat pelaporan keuangan juga akan meningkat bila didukung oleh perwakilan LPD yang memahami norma-norma pembukuan moneter dengan baik, memahami bagaimana sistem pembukuan dan pelaksanaannya dilakukan dengan mengacu pada pendekatan-pendekatan pembukuan material.

Kebijakan akuntansi yang berlaku di LPD telah diatur oleh Perda nomor 4 tahun 2012 dan kebijakan akuntansi ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Standar Akuntansi Keuangan ETAP (Rahayu, 2016 dalam Karuniawan,2017). Jadi dalam penanganan sebuah organisasi sumber daya manusia harus berorientasi pada pengetahuan dan pemahaman yang akan menentukan hasil dari asosiasi. Hal ini penting untuk membantu pencapaian tujuan LPD. Dengan tujuan agar kemampuan SDM yang terampil dalam menjalankan kewajibannya akan memperoleh kemajuan asosiasi dan menciptakan serta memiliki pilihan untuk memperkenalkan data laporan

keuangan yang berkualitas. Masalah itu ada pada beberapa LPD Kabupaten Buleleng, dari aspek kompetensi sumber daya manusia masih belum memadai salah satunya dari segi pendidikan. Dalam unsur hipotesis, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang sesuai benar-benar dapat menyiapkan laporan keuangan sesuai SAK dan dana terpisah yang diawasi oleh swasta atau badan usaha. (Mutuari & Yudiantara, 2021). Akan tetapi pegawai di beberapa LPD tidak memiliki pendidikan terakhir di bidang akuntansi dan masih banyak LPD yang menggunakan wakil-wakil dalam perencanaan pengumuman anggaran yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar penyusunan rangkuman anggaran yang baik dan benar sehingga dalam penyusunan ikhtisar anggaran pekerja, ini jelas akan mempengaruhi sifat data moneter yang dibuat. Jadi memeriksa bagaimana dampak dari kemampuan aset manusia ini pada pengembangan nilai laporan moneter dipandang penting.

Sudut pandang kedua yang harus dilihat seberapa besar pengaruhnya terhadap pembuatan laporan nilai moneter oleh LPD pemodal moneter adalah pemanfaatan inovasi data di LPD. Di jaman modern ini teknologi informasi sudah sangat melekat pada keberadaan manusia. Kehadiran inovasi data dapat membantu dan bekerja dengan pekerjaan manusia. Secara umum, keuntungan yang disajikan oleh inovasi data mencakup kecepatan penanganan pertukaran dan membantu kesiapan laporan. Selain itu, dapat menyimpan banyak informasi, membatasi kesalahan, dan menurunkan biaya penanganan. (Sembiring, 2017). Adanya penerapan teknologi informasi akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, jauh dari kesalahan dan dapat dilaporkan tepat waktu. Penerapan teknologi informasi khususnya komputer akan sangat membantu

dihasilkannya laporan keuangan (Karuniawan, 2017). Oleh karena itu Penggunaan inovasi teknologi informasi data sangat penting dalam mendukung suatu zat. Semakin cepat ringkasan anggaran diperkenalkan, semakin baik dalam hal navigasi. Permasalahan yang ditemukan di LPD pada saat kelapangan ditemukan beberapa LPD belum menerapkan teknologi informasi. Selain itu dilansir dari (<https://m.rri.co.id>) dimana pengamat ekonomi buleleng bapak Parma menilai pencatatan keuangan di beberapa LPD masih dilakukan secara manual. Hal ini memungkinkan penyebab pembuatan laporan keuangan memakan waktu yang lama. Sehingga perlu diamati seberapa jauh penerapan teknologi informasi memberi kontribusi terhadap dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas.

Aspek ketiga yang perlu diamati sejauh mana dapat mempengaruhi dihasilkannya informasi keuangan yang berkualitas dapat dihasilkan adalah sistem pengendalian internal. Menurut Tunggal (2010) Pengendalian Internal adalah suatu proses dimaksudkan untuk memberikan penegasan yang masuk akal tentang pencapaian tiga kelompok sasaran, khususnya kualitas pengumuman moneter yang tak tergoyahkan, kelayakan juga, kecakapan kerja, dan konsistensi dengan peraturan dan pedoman terkait. Menurut Mulyadi (2010), pelaksanaan pengendalian internal yang baik memastikan bahwa siklus berurusan dengan data akuntansi akan memberikan informasi terkait uang yang tepat dan dapat diandalkan karena data akuntansi mencerminkan perubahan aset hierarkis. Menurut Arifiyani (2012), jika kerangka pengendalian orang dalam tidak berdaya, akan membuat sumber daya organisasi menjadi tidak stabil, data pembukuan yang salah dan menipu, ketidakefektifan dan kecakapan latihan fungsional organisasi.

Dengan cara ini, pengendalian internal dalam suatu organisasi organisasi, lembaga keuangan atau yayasan non-moneter adalah hal yang paling menarik dan sangat diperlukan karena pelaksanaan dan pelaksanaan fungsional memerlukan strategi khusus yang dapat membantu dan memberikan titik potong yang luar biasa. dan pengaturan dalam setiap pelaksanaan latihannya. Pengendalian batin diperlukan agar tidak sulit untuk melacak atau memeriksa masalah yang ada atau masalah yang mungkin terjadi selama waktu yang dihabiskan untuk mencapai tujuan sehingga pencapaian tujuan dapat dibedakan dengan jelas. Sehingga dengan Sistem Pengendalian Intern yang idealnya diselesaikan secara berkesinambungan oleh otoritas dan seluruh perwakilan, akan memberikan kepercayaan yang cukup terhadap pelaksanaan latihan yang layak dan cakap, keandalan perincian moneter, dan konsistensi dengan peraturan dan pedoman yang akan menghasilkan pengumuman yang berkualitas. (Ratmadi, 2021).

Akan tetapi Pengendalian internal di LPD Kabupaten Buleleng Bisa dibidang masih sangat kurang, hal ini dikarenakan masih banyak perkumpulan LPD yang mengutamakan individu-individu tertentu dalam menyiapkan laporan. Seperti yang ditunjukkan oleh Hartadi (1999) tidak ada yang perlu mengendalikan beberapa kewajiban kemampuan, ini agar pelaksanaan pertukaran selesai secara produktif dan menghindari kegagalan, selain itu lemahnya pengawasan dan kurang tegasnya peraturan yang ada dalam LPD. Dengan adanya permasalahan tersebut, Hal ini tentunya akan mempengaruhi pengumuman moneter yang disampaikan oleh LPD karena perwakilan mata kuliah yang merencanakan laporan keuangan akan merasa terkendala dalam menyelesaikan rincian keuangan, mengakibatkan pengungkapan moneter yang kurang tepat dan akan

menimbulkan hambatan dalam penyusunan ringkasan anggaran / laporan keuangan.

Alasan peneliti memilih tiga aspek di atas yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal karena dilihat dari survey awal penelitian di dapatkan aspek kompetensi sumber daya manusia dilihat dari tingkat pendidikan pegawai LPD Kabupaten Buleleng yang bervariasi dimana tidak memiliki pendidikan terakhir di bidang akuntansi, sehingga memiliki kelemahan dalam penyajian laporan keuangan karena belum memahami standar akuntansi. Untuk penerapan teknologi informasi belum diterapkan secara maksimal sehingga proses penyusunan informasi keuangan tidak dapat disusun dengan baik dan memakan waktu yang lama. Dan dari segi aspek sistem pengendalian internal yang masih lemah, Hal ini dikarenakan masih banyaknya perkumpulan LPD yang mengutamakan individu-individu tertentu dalam menyiapkan laporan anggaran, sehingga agak kurang rasional dalam pembagian tugas atau masih ada peran ganda dalam organisasi LPD, dan kurang tegasnya peraturanyang ada dalam LPD.

Beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang aspek yang dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan diantaranya dilakukan oleh Karuniawan (2017) yang membuktikan Produktivitas SDM dan pemanfaatan inovasi data jelas mempengaruhi sifat pengumuman moneter. Dari hasil ini cenderung masuk akal bahwa dengan asumsi bahwa kemampuan SDM ditingkatkan, itu akan mendorong sifat laporan keuangan yang unggul, meskipun pemanfaatan inovasi data sangat penting dalam pengelolaan elemen di mana inovasi ini diterapkan dapat mengurangi kesalahan dan menghemat waktu dalam

perencanaan ringkasan anggaran. Dari hasil eksplorasi, Agustinus dan Kusumaningtyas (2021) menunjukkan bahwa kemahiran SDM, pelaksanaan kerangka pengendalian internal, dan pemanfaatan inovasi data dalam sifat laporan moneter sangat mempengaruhi sifat laporan moneter. Hasil eksplorasi yang diarahkan oleh Ratmadi (2021) menunjukkan bahwa kerangka pengendalian internal dan produktivitas SDM sangat mempengaruhi sifat pengungkapan moneter, lebih lanjut, Otari (2020) menunjukkan efektivitas SDM, dan pemanfaatan inovasi data. Kerangka kontrol interior jelas mempengaruhi sifat laporan fiskal. Bagaimanapun, eksplorasi oleh Pottery (2020) menghasilkan bahwa kecakapan SDM memengaruhi sifat pengumuman moneter.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Karuniawan, 2017). Perbedaan antara tinjauan ini dan pemeriksaan masa lalu terletak pada wilayah pemeriksaan di mana spesialis penelitian dulu hanya mengambil beberapa sub-lokal di Kabupaten Buleleng dan belum berkonsentrasi pada bagian-bagian dari kerangka kontrol interior yang mempengaruhi sifat laporan anggaran pemerintah. LPD Kabupaten Buleleng. Alasan diambilnya faktor SPI ini adalah karena SPI masih lemah di LPD mengingat masih banyak asosiasi LPD yang mengutamakan individu-individu tertentu dalam menyusun ikhtisar anggaran, tidak adil dalam bahwa kerangka berpikir usaha atau masih ada pekerjaan yang berbeda di LPD asosiasi, dan tidak adanya pedoman berat yang ada di LPD.

Topik penelitian ini penting dikaji pada LPD Kabupaten Buleleng mengingat LPD yang dibangun di desa daerah Kabupaten Buleleng adalah salah satu lembaga keuangan di masyarakat yang dapat menumbuhkan sektor

perekonomian masyarakat desa. Dilihat dari data LP-LPD (2017) dalam Sadiartha (2020) LPD yang ada di Kabupaten Buleleng paling besar mendapatkan dana perlindungan yaitu sebesar 630.000.000 untuk 13 LPD yang tergolong tidak sehat atau tidak beroperasi, dana perlindungan ini dimaksudkan agar LPD yang bersangkutan bisa beroperasi lagi. Akan tetapi dilihat dari tahun 2018 LPD mengalami penurunan kesehatan sebanyak 42 LPD, hingga saat ini sebanyak 54 LPD yang mengalami penurunan kesehatan (LPLPD Kabupaten Buleleng). Kemajuan LPD bergantung pada sifat laporan keuangannya karena laporan keuangan yang berkualitas sebenarnya akan mempengaruhi kemajuan yayasan keuangan itu sendiri, namun dari 169 LPD di Kabupaten Di Buleleng, masih ada LPD yang terlambat mengumumkan laporan keuangannya, seperti LPD Tunjung. Akomodasi laporan yang tidak nyaman akan mempengaruhi penundaan perbaikan moneter LPD.

Selain itu dilihat dari penelitian terdahulu belum ada yang meneliti Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Keuangan di LPD Kabupaten Buleleng dengan cakupan yang luas.

Berdasarkan permasalahan dan adanya perbedaan hasil penelitian, untuk itu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kualitas informasi keuangan di LPD Kabupaten Buleleng dengan alasan bahwa masih ada LPD yang telat dalam melaporkan keuangannya disebabkan karena minimnya pengetahuan LPD dalam pembuatan laporan keuangan, masih manualnya pencatatan serta masih ada di dalam organisasi yang memberatkan orang tertentu dalam penyusunan laporan keuangan dan kurang adil dalam pembagian tugas atau masih terdapat peran

ganda dalam organisasi tersebut serta kurang tegasnya peraturan yang ada di beberapa LPD. Maka peneliti bermaksud melakukan penelitian terhadap **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Informasi Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng”**. Karena dengan kualitas laporan keuangan LPD yang baik akan berdampak pada keberlangsungan dan kemajuan LPD tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa pokok masalah, antara lain:

1. Terdapat LPD di Kabupaten Buleleng yang terlambat dalam pembuatan laporan keuangan.
2. Kompetensi SDM belum memadai, dilihat dari beberapa pegawai LPD tidak memiliki pendidikan terakhir di bidang akuntansi, Sehingga memiliki kelemahan dalam penyajian laporan keuangan karena belum memahami standar akuntansi.
3. Penerapan TI belum maksimal, hal ini berpengaruh terhadap penyelesaian pembuatan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat.
4. Lemahnya pengendalian internal, menyebabkan kurang tegasnya peraturan yang ada di LPD, kurang adil dalam pembagian tugas, memberatkan orang tertentu dalam pembuatan laporan keuangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah diperlukan dalam konsentrat ini untuk membuat titik fokus pemeriksaan lebih jelas mengingat pemanfaatan faktor eksplorasi. Terdapat beberapa penelitian terkait kualitas informasi keuangan. Namun Fokus penelitian ini untuk meneliti permasalahan mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi keuangan LPD Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan peneliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan LPD Kabupaten Buleleng?
2. Apakah penerapan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan LPD Kabupaten Buleleng?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan LPD Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh temuan yang teruji tentang pengaruh sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi keuangan LPD Kabupaten Buleleng.

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan teknologi informasi terhadap kualitas informasi keuangan LPD Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi keuangan LPD Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat samping dari penelitian ini seharusnya memberikan bahan yang berharga untuk peningkatan pemeriksaan logis di hal kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi keuangan khususnya di Lembaga Perkreditan Desa.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Lembaga Perkreditan Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna membangun dan mengembangkan Lembaga Perkreditan Desa agar nantinya lembaga ini memiliki kualitas informasi keuangan yang baik sehingga mengalami kemajuan dari waktu ke waktu untuk terus memfasilitasi aktivitas perekonomian masyarakat desa adat di Bali khususnya di Kabupaten Buleleng.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi keuangan khususnya di Lembaga Perkreditan Desa.

